



LKJIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan Sutan Syahrir No. 15 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah

Telp : (0532) 27963 E-mail : dpkkobar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKjIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa yang akan datang. LKjIP ini juga merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program dan kegiatan yang ada dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai Perencanaan kinerja dan realisasi/capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022.

Dalam rangka memenuhi fungsi LKjIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LKjIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Barat, khususnya penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan. Segala prestasi yang berhasil diraih tidak menyebabkan munculnya rasa bangga yang berlebihan sehingga melupakan tujuan awal untuk selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sebaliknya segala kekurangan yang masih dijumpai tidak menyebabkan lemahnya motivasi tetapi justru harus menjadi cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga LKjIP ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas tugas Pemerintahan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat khususnya bidang perpustakaan dan kearsipan.

Pangkalan Bun, Februari 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	IKM (Index Kepuasan Masarakat) Bidang Perpustakaan	90	83,09	92,32%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 1					92,32%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	90	80,80	89,78%	Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					89,78%	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 91,05% dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**,

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

1. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi menuju era perpustakaan digital.

Dengan tersambungny jaringan internet melalui komputer maupun ponsel membuat orang lebih mudah memperoleh informasi. pada saat ini

informasi apapun tersedia di internet asal kita tau alamat (home page) informasi tersebut berada.

2. Rendahnya Minat Baca Masyarakat,
3. Pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolahan masih relatif rendah dan masih bersifat konvensional untuk menciptakan sebuah perpustakaan modern tidak mudah sebab dibutuhkan biaya besar dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola perpustakaan dan kearsipan yang berkualitas,
4. Belum membudayanya pemahaman paradigma perpustakaan dan kearsipan sebagai pusat kegiatan dan informasi,
5. Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi masih terbatas,
6. Layanan perpustakaan keliling belum menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat,
7. Belum optimalnya kerjasama pengelola kearsipan antar SKPD,
8. Terbatasnya SDM pengelola kearsipan,
9. Kurangnya pemahaman dan kesetaraan pemikiran aparatur terhadap pentingnya kearsipan.

Beberapa faktor pendorong dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang No. 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan,
2. Undang - Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan,
3. Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan,
4. Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kearsipan,
5. Peraturan Bupati Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Jadwal Retensi Arsip,
6. Peraturan Bupati Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis,
7. Peraturan Bupati Nomor : 12 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Arsip,
8. Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin,

9. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat periode Tahun 2017 – 2022,
10. Adanya Kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja,
11. Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem,
12. Dukungan dari mitra kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam peningkatan Pelayanan Publik.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan , melalui upaya :
 - a) Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penggunaan dan pengelolaan data.
 - b) Meningkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna layanan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik, melalui upaya:
 - a) Meningkatkan kompetensi SDM yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b) Menyusun Perencanaan, Mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan realisasi kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu.
 - c) Menyusun dan menyajikan laporan kinerja kegiatan sesuai target yang sudah ditetapkan.
 - d) Menyusun dan mengendalikan resiko dalam rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kinerja.
 - e) Menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang diberikan oleh pengawas pembangunan daerah.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat / mitra kerja dalam peningkatan kesejahteraan sosial , dengan upaya :
 - a) Pemberdayaan Peran serta masyarakat/ mitra kerja, baik meningkatkan jumlah dan kompetensinya.
 - b) Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lembaga terkait

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian dalam LKjIP tahun 2022 ini, diakui masih dijumpai beberapa kekurangan yang masih perlu mendapatkan perhatian oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat, kekurangan tersebut masuk dalam kerangka rencana program, mengingat :

1. Dukungan sarana dan prasarana belum memadai,
2. Dukungan anggaran masih terbatas.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat berharap dimasa yang akan datang dapat menyediakan layanan perpustakaan berupa peningkatan sarana prasarana yang mendukung otomasi perpustakaan dan kedepan arsip lebih meningkatkan SDM, sarana prasarana di bidang otomasi kearsipan sehingga apa yang menjadi harapan tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tercapai.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ikhtisar Eksekutif..... iii

Daftar Isi vii

Daftar Tabel..... viii

Daftar Gambar ix

BAB I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Data Umum 2

1.3 Aspek Strategis 8

1.4 Permasalahan Utama 11

1.5 Landasan Hukum 12

1.6 Sistematika Penyajian 13

BAB II Perencanaan Kinerja 15

2.1 Rencana Strategis Inspektorat 15

2.2 Indikator Kinerja Utama..... 18

2.3 Rencana Kinerja Tahunan..... 19

2.4 Perjanjian Kinerja 19

BAB III Akuntabilitas Kinerja 26

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 27

3.2 Analisis Capaian Kinerja 27

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional 37

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 37

3.5 Realisasi Keuangan 38

BAB IV Penutup..... 43

Lampiran-Lampiran 47

DAFTAR TABEL

Tabel: 1.1	Peta Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	3
Tabel: 1.2	Data Pegawai Per 31 Desember 2022.....	6
Tabel: 1.3	Analisis Kebutuhan Pegawai 2022.....	6
Tabel: 1.4	Data Aset Tahun 2022.....	8
Tabel: 1.5	Alternatif Strategi Berdasarkan Analisis SWOT.....	9
Tabel: 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2017 – 2022.....	16
Tabel: 2.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2019-2022.....	17
Tabel: 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	18
Tabel: 2.4	Rencana Kinerja Tahun 2022.....	19
Tabel: 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.....	20
Tabel: 2.6	Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022.....	21
Tabel: 2.7	Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022.....	23
Tabel: 3.1	Skala Nilai Perangkat Daerah.....	26
Tabel: 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022.....	27
Tabel: 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 Perpustakaan.....	28
Tabel: 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Perpustakaan..	29
Tabel: 3.5	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Perpustakaan.....	30
Tabel: 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022 Kearsipan	33
Tabel: 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir Kearsipan.....	34
Tabel: 3.8	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Kearsipan.....	35
Tabel: 3.9	Kegiatan Lintas Sektor.....	37
Tabel: 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	38
Tabel: 3.11	Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem Integrasi Perencanaan, Capaian Monitoring Dan 25
Evaluasi Kinerja.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya

dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Data Umum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintah bidang kearsipan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan arsip dan pelayanan arsip,
2. Pembinaan dan pengawasan kearsipan,
3. Pembinaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan layanan perpustakaan,
4. Pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut:

Tabel: 1.1

Peta Jabatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1 Kepala Dinas		1 JF Arsiparis Muda/Pertama
2 Sekretaris		2 JF Arsiparis

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
		Penyelia/ Mahir/ Terampil
1 Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Perlengkapan	1 Pengelola Kepegawaian	3 JF Pustakawan Muda/Pertama
	2 Pengelola Barang Milik Negara	4 JF Pustakawan Penyelia/ Mahir/ Terampil
	3 Pengadministrasi Umum	
2 Kepala Sub Bagian Keuangan	1 Bendahara 2 Verifikator Keuangan 3 Pengelola Keuangan 4 Penata Laporan Keuangan 5 Pengadministrasi Keuangan	
3 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program	1 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 2 Pengolah Data Perencanaan Penganggaran 3 Pengelola Bahan Perencanaan	
3 Kepala Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka		
1 Kepala Seksi Pengembangan dan Pengolaahan Bahan Pustaka	1 Pengelola Bahan Pustaka 2 Pengelola Pustaka Elektronik 3 Pengadministrasi Umum	
2 Kepala Seksi Pelestarian Bahan Pustaka	1 Pengelola Bahan Pustaka 2 Pengelola Pustaka Elektronik 3 Pengadministrasi Umum	
3 Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Perpustakaan	1 Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia 2 Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	
	3 Pengadministrasi Umum	
1 Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan, Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Layanan		

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1 Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan	1 Pengawas Perpustakaan 2 Pengelola Perpustakaan 3 Penyuluh Perpustakaan	
2 Kepala Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca	1 Penyuluh Perpustakaan 2 Pengadministrasi Umum	
3 Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan	1 Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan 2 Penyusun Rencana Kerja Sama Kelembagaan 3 Pengadministrasi Perpustakaan	
1 Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip		
1 Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan Arsip	1 Pranata Kearsipan 2 Pengadministrasi Umum	
2 Kepala Seksi Pengelolaan dan Preservasi Arsip	1 Pranata Kearsipan 2 Pengadministrasi Umum	
3 Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip	1 Pranata Kearsipan 2 Pengadministrasi Umum	
1 Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		
1 Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	1 Pengadministrasi Umum 2 Pranata Kearsipan 3 Penyuluh Kearsipan	
2 Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan pada Desa dan Kelurahan, Perusahaan, Ormas, Orpol & Perseorangan	1 Pengadministrasi Umum 2 Pranata Kearsipan 3 Penyuluh Kearsipan	
3 Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	1 Pengadministrasi Umum 2 Pranata Kearsipan	
	3 Analis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	

Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami perubahan.satu kali yaitu Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022,

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kependidikan Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022, mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 49 orang Pegawai sebagaimana data berikut:

Tabel: 1.2
Data Pegawai Per 31 Desember 2022

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai yang Ada	Jenis Kelamin		Kualifikasi					Status Kepegawaian	
			Laki-laki	Perempuan	S2	S1	D3	SM A	SD	PNS/CPNS	Kontrak
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1		1					1	
B	Jabatan Administrator										
	1. Administrator	5	2	3	1	4				5	
	2. Pengawas	1		1	1					1	
	3. Pelaksana	23	13	10		9	1	13		4	19
C	Jabatan Fungsional	19	6	13		12	5	2		19	
	Jumlah	49	22	27	3	25	6	15	0	30	19

Sumber: Data Pegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 1.3
Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Uraian	Jabatan	Formasi Sesuai Keputusan	Kondisi Saat Ini	Kekurangan
Sekretariat	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	1
	Pengelola Data Perencanaan Penganggaran	1	0	1
	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
	Verifikator Keuangan	1	0	1
	Pengelola Keuangan	1	0	1

	Penata Laporan Keuangan	1	0	1
	Pengadministrasi Keuangan	1	0	1
	Pengelola Kepegawaian	1	0	1
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	1	0	1
Kepala Bidang Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan Layanan	Pengelola Bahan Pustaka	2	1	1
	Pengelola Pustaka Elektronik	2	0	2
	Pengadministrasi Umum	3	0	3
	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	1	0	1
	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	0	1
Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Pengawas Perpustakaan	1	0	1
	Penyuluh Perpustakaan	3	0	3
	Pengelola Perpustakaan	1	0	1
	Pengadministrasi Umum	4	0	4
	Penyuluh Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	1	0	1
	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	1	0	1
Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip	Pengadministrasi Umum	3	0	3
	Pranata Kearsipan	6	0	6
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Pengadministrasi Umum	2	1	1
	Pranata Kearsipan	3	1	2
	Penyuluh Kearsipan	2	0	2
	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	0	1
Jabatan Fungsional	Pustakawan Muda/Pertama	2	1	1
	Pustakawan Penyelia/Mahir/Terampil	3	1	2
	Arsiparis Muda/Pertama	2	0	0
	Arsiparis Penyelia/Mahir/Terampil	3	1	2
Jumlah Seluruhnya		57	6	49

Sumber: Data Diolah

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 1.4
Data Aset Tahun 2022

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	Tanah	1	645.200.000

No	Klasifikasi	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
2	Peralatan & Mesin	Alat-alat Besar	-	-
		Alat-alat Angkut	6	566.745.000
		Alat Bengkel dan Alat Ukur	1	2.000.000
		Alat Kantor dan Rumah Tangga	709	1.955.245.260
		Alat Studio Komunikasi	16	105.253.400
		Alat Laboratorium	16	8.368.046
		Alat Persenjataan	2	27.550.000
		Alat Komputer	113	853.297.485
3	Gedung & Bangunan	Bangunan Gedung Kantor	13	3.634.852.517,77
		Gedung Rumah Dinas	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jalan	-	-
		Jembatan	-	-
		Instalasi Listrik dan Telp	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	Bahan Perpustakaan	44.307	2.562.754.423
		Barang Bercorak Kesenian	-	-
6	Aset Lainnya	Aset Tak Berwujud	4	94.345.000
		Aset rusak berat	8	22.710.000
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan		-	-

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022

1.3 Aspek Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung. Untuk isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, antara lain meliputi :

1. Tranformasi Perpustakaan digital seKotawaringin Barat menuju transformasi perpustakaan digital nasional untuk membentuk satu ekosistem digital,

2. Mewujudkan perpustakaan Kotawaringin Barat menjadi perpustakaan yang berstandar nasional (Standar Nasional Perpustakaan/SNP),
3. Mewujudkan perpustakaan Kotawaringin Barat berbasis inklusi sosial untuk memperkuat budaya literasi,
4. Meningkatkan sinergitas dengan stakeholder terkait terhadap pengelolaan perpustakaan desa/kel, TBM sesuai Standar Nasional Perpustakaan/SNP,
5. Mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno dan budaya etnis nusantara,
6. Meningkatkan Manajemen kearsipan (arsip dinamis maupun arsip statis) bagi SKPD, Desa/Kel dalam rangka mempercepat proses reformasi birokrasi,
7. Mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan, termasuk dalam mengantisipasi penyelamatan dan perlindungan arsip secara elektronik (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE).

Identifikasi terhadap isu-isu strategis diatas sangat penting untuk memahami kondisi riil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat. Atas dasar informasi tersebut dapat dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

Tabel 1.5
Alternatif Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Internal	PELUANG (Opportunities)	ANCAMAN (Threats)
	Regulasi yang bersifat dinamis dan berkomitmen	Meningkatnya pengaruh negatif globalisasi dan modernisasi dalam bentuk teknologi yang negatif.
External	Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah	Adanya inkonsistensi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah
	Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait	Bahan pustaka yang dipinjam baik pengunjung maupun silang layanan tidak dikembalikan .
KEKUATAN (Strengths)	Alternatif Strategi (SO)	Alternatif Strategi (ST)

Dukungan dan komitmen Pimpinan	Meningkatkan dan memaksimalkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Menciptakan tatakelola kelembagaan yang profesional
Koordinasi dan kerjasama yang baik	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan teknis bidang urusan wajib	Memanfaatkan komitmen dan dukungan Pimpinan untuk mewujudkan pelayanan prima
Sistem dan prosedur yang dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kemajuan teknologi.	Peningkatan kinerja sumber daya aparatur untuk mewujudkan clean governance dan pelayanan prima	Meningkatkan integritas aparatur dalam menghadapi setiap perubahan yang terjadi
Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara efektif dan efisien	Pemanfaatan regulasi atau produk hukum untuk mengelola sumber daya	Optimalisasi koordinasi antar bidang dan lintas sektoral (internal maupun eksternal) untuk menghindari pola pikir parsial
Regulasi terkait perpustakaan dan kearsipan		
KELEMAHAN (Weakneses)	Alternatif Strategi (WO)	Alternatif Strategi (WT)
Jumlah maupun kualitas tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan belum memadai dan penguasaan Teknologi Informasi masih terbatas	Memaksimalkan kemampuan dan kapasitas keahlian aparatur	Meningkatkan pengetahuan penggunaan teknologi informasi untuk mengimbangi perkembangan yang terjadi
Masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan terutama yang menyangkut pelayanan berbasis teknologi urusan perpustakaan dan kearsipan.	Meningkatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur dan standar pelayanan untuk pengelolaan perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan peran pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai urusan Perpustakaan dan Kearsipan
Kurang meratanya pemahaman masyarakat terhadap dunia perpustakaan dan kearsipan.	Melakukan sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mempunyai peranan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dan perpustakaan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan literasi masyarakat. Melakukan sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan terhadap pemahaman pentingnya arsip,	Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait

1.4 Permasalahan Utama

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang lancarnya penggunaan jaringan IT karena keterbatasan kapasitas jaringan internet,
- 2) Belum memiliki SDM khususnya petugas pengelola IT,
- 3) Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat,
- 4) Koleksi bahan perpustakaan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
- 5) Ketersediaan koleksi bahan pustaka di perpustakaan desa/kel, TBM masih kurang memadai,
- 6) Sarana dan prasarana sebagian besar perpustakaan belum memenuhi standart nasional,
- 7) Respon dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi perpustakaan masih rendah,
- 8) Belum maksimalnya peran perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- 9) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Sudut /Pojok Baca, dan lain-lain,
- 10) Belum optimalnya koordinasi antar *stakeholder* dalam hal pemberdayaan perpustakaan, sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan,
- 11) Belum adanya kesadaran masyarakat tentang keberadaan naskah kuno,

- 12) Belum adanya kesadaran masyarakat tentang keberadaan naskah kuno,
- 13) SDM terkait pengalih mediaan naskah kuno belum tersedia,
- 14) Belum tersedianya koleksi budaya etnis nusantara,
- 15) Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholder pengelola arsip SKPD, Desa/Kelurahan,
- 16) SKPD belum optimal sebagai pencipta arsip masih minim dalam pengelolaan kearsipan,
- 17) Sebagian besar SKPD belum ada arsiparis,
- 18) Kompetensi tenaga teknis kearsipan di SKPD, Desa/Kelurahan belum memadai,
- 19) Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyimpanan arsip pada SKPD dan Desa/Kel,
- 20) Belum adanya Armada Jemput Arsip (mobil sadar arsip) pada LKD
- 21) Depo arsip belum memenuhi standar nasional,
- 22) belum dilaksanakannya audit/pengawasan internal kearsipan (SKPD, Desa/Kel),
- 23) Aplikasi dan sarana prasarana sebagai transformasi menuju e-arsip belum tersedia.

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Tahun 2022 meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 atas Capaian kinerja tahun 2022 diukur serta dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Kata Pengantar

- i Ikhtisar Eksekutif
- ii Daftar isi
- iii Daftar Tabel
- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Latar belakang
 - 1.2 Data Umum
 - 1.3 Aspek Strategis
 - 1.4 Permasalahan Utama
 - 1.5 Landasan Hukum
 - 1.6 Sistematika Penyajian
- Bab II Perencanaan Kinerja
 - 2.1 Rencana Strategis
 - 2.2 Indikator Kinerja Utama

- 2.3 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.4 Perjanjian Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 3.2 Realisasi Anggaran
- Bab IV Penutup
- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Solusi Atas Permasalahan
- Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun 2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:

**“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU
KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Visi ini berorientasi pada kata **IKHLAS**, yaitu:

I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,
K = KETAKWAAN,
H = HARMONIS,
L = LANGGENG,
A = AMAN,
S = SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral **NURANI**, yaitu:

N = NASIONALIS,
U = UNGGUL,
R = RELIGIUS,
A = AMANAH,
N = NYATA,
I = INSPIRATIF

Dalam rangka upaya mencapai dan mendukung Visi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, maka sesuai misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan,
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 – 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan kunjungan yang didukung sarana dan prasarana berbasis TI		Indeks Minat Baca	10%	20%	30%	40%	60%
		Meningkatnya Minat dan budaya baca masyarakat,	Persentase Pengunjung perpustakaan se Kab. Ktw. Barat	10%	20%	30%	40%	60%
2.	Terciptanya penataan dan pengelolaan arsip in aktif / arsip statis dengan baik yang didukung sarana dan prasarana berbasis TI		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan E-Government	10%	20%	30%	40%	50%
		Terciptanya Tata kelola arsip yang sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase lembaga/institusi pemerintah yang telah menerapkan arsip sesuai peraturan perundang-undangan	10%	20%	30%	40%	50%

Namun berdasarkan hasil evaluasi sapip oleh kemenpan RB tanggal 13 agustus 2019 di Palangka Raya maka sasaran dan indikator pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami perubahan sebagaimana berikut :

Tabel 2.2

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -			
				2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat melalui pengembangan bahan bacaan, layanan dan perpustakaan desa/kelurahan.	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat .	IKM (Index Kepuasan Masarakat) Bidang Perpustakaan.	86%	88%	89%	90%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui ketentuan penyelenggaraan kearsipan disemua SKPD di lingkungan Pemerintahan Kab. Kotawaringin Barat dan pengamanan arsip statis Pemerintahan Daerah.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.	Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan.	70%	70%	80%	90%

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019-2022

Sesuai dengan Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 maka ada 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja dan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran penunjang dengan 2 (dua) indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun berjalan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel: 2.3
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	IKM (Index Kepuasan Masyarakat) Bidang Perpustakaan	Survei IKM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	penilaian hasil audit kearsipan eksternal provinsi kalimantan tengah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perubahan atau hasil reviu Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kotawaringin Barat, Nomor : 040/21.1/DPK, Tahun 2019

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel: 2.4

Rencana Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	IKM (Index Kepuasan Masyarakat) Bidang Perpustakaan.	90 %
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Capaian Nilai Pengawasan/ Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	90%

Sumber: Data Diolah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel: 2.5

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat	IKM bidang Perpustakaan	90%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Kemanfaatan Teknologi	Capaian Nilai Pengawasan/ Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	90%

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.6
Anggaran Program dan Kegiatan Yang Terkait langsung Dengan
Capaian Kinerja Tahun 2022

Uraian Belanja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat			
Program Pembinaan Perpustakaan	771.038.797	798.870.453	27.831.656
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	696.591.496	740.295.107	43.703.611
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	15.000.000	5.000.000	-10.000.000
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.182.764	94.501.964	25.319.200
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75.013.150	73.841.800	-1.171.350
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	351.316.417	378.542.578	27.226.161
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	186.079.165	188.408.765	2.329.600
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.447.301	58.575.346	-15.871.955
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	42.974.132	26.540.132	-16.434.000
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	31.473.169	32.035.214	562.045
Program Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	77.684.500	80.551.500	2.867.000
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	77.684.500	80.551.500	2.867.000
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	77.684.500	80.551.500	2.867.000
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Kemanfaatan Teknologi			
Program Pengelolaan Arsip	211.260.944	187.865.175	-23.395.769
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah	67.359.700	67.048.480	-311.220

Uraian Belanja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kabupaten/Kota			
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	18.519.700	19.924.700	1.405.000
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	48.840.000	47.123.780	-1.716.220
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten /Kota	98.898.244	76.840.995	-22.057.249
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	98.898.244	76.840.995	-22.057.249
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	45.003.000	43.975.700	-1.027.300
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	24.997.000	24.555.700	-441.300
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	20.006.000	19.420.000	-586.000
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.940.000	2.940.000	0
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2.940.000	2.940.000	0
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	2.940.000	2.940.000	0
JUMLAH	982.299.741	986.735.628	7.302.887

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Tabel: 2.7

Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Uraian Belanja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Sasaran: Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi			
Sasaran: Menyediakan Dukungan bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.462.488.759	5.471.128.872	8.640.113
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.733.800	9.558.800	-3.175.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.074.800	1.899.800	-3.175.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.126.250	2.126.250	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.881.250	1.881.250	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.448.250	1.448.250	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.448.250	1.448.250	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	360.000	360.000	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.000	395.000	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.393.903.000	4.348.823.470	-45.079.530
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.264.443.000	4.221.658.870	-42.784.130
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	104.097.000	113.776.000	9.679.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.175.500	13.201.100	-11.974.400
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	187.500	187.500	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.982.000	57.950.549	-6.031.451
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.400.000	17.400.000	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46.582.000	40.550.549	-6.031.451
Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.577.377	225.106.118	10.528.741
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.831.066	6.893.166	62.100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.808.021	62.352.174	544.153
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.940.040	10.030.405	90.365
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.748.250	18.750.000	1.750
P0enyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	102.250.000	115.425.373	13.175.373

Uraian Belanja	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
SKPD			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000	11.655.000	-3.345.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan Urusan Pemerintah Daerah	18.049.988	34.103.485	16.053.497
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.049.988	34.103.485	16.053.497
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.952.600	339.809.950	-5.142.650
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	1.050.000	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.775.600	138.451.600	-17.324.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.127.000	200.308.350	12.181.350
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	414.289.994	455.776.500	41.486.506
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.987.494	36.218.000	6.230.506
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.000.000	53.281.000	10.281.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.602.500	35.602.500	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.700.000	330.675.000	24.975.000
JUMLAH	5.462.488.759	5.471.128.872	8.640.113

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki instrumen pendukung berupa aplikasi inislite untuk membantu mempercepat pencapaian target kinerja, dimana Maksud dan tujuan aplikasi inislite ini adalah untuk meningkatkan kualitas otomasi perpustakaan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustnas No. 19 tahun 2016 tentang penetapan inislite sebagai aplikasi resmi Perpustakaan Nasional, yang bertujuan salah satunya adalah untuk membantu pengembangan otomasi perpustakaan di seluruh Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Kotawaringin Barat melaksanakan migrasi dari aplikasi IBRA ke aplikasi inlislite.

Gambar 2.1
Sistem Integrasi Perencanaan, Capaian Monitoring Dan Evaluasi Kinerja



Sumber: <http://www.perpusda.kotawaringinbaratkab.go.id/>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.1

Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pada tahun 2022, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	IKM (Index Kepuasan Masarakat) Bidang Perpustakaan	90	83,09	92,32%	Sangat Tinggi
Capaian sasaran strategis 1					92,32%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	90	80,80	89,78%	Tinggi
Capaian sasaran strategis 2					89,78%	

Sumber: Data diolah

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis diuraikan dibawah ini:

1 Sasaran: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

- **Indikator Kinerja: IKM (Index Kepuasan Masarakat) Bidang Perpustakaan**

Penjelasan sebagai berikut :

- 1) **Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja** yang tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
IKM (Index Kepuasan Masyarakat) Bidang Perpustakaan	%	90	83,09	92,33

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan indikator kinerja Index Kepuasan Masyarakat (IKM), menetapkan target yang ingin dicapai sebesar 90% dan terealisasi sebesar 83,09%, ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja lebih rendah dibanding dengan target sehingga capaian kinerja sasaran tidak 100% atau tidak tercapai. namun hasil pengukuran kinerja sasaran tercapai sebesar 92,33% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

Guna mengetahui Index kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk memonitor kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang selama ini dilakukan. SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu pengumpulan

data berupa kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan sebagai responden secara langsung. Pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur variabel, Kesembilan unsur tersebut adalah **Persyaratan pelayanan, Prosedur pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif , Produk /Spesifikasi Pelayanan , Kompetensi Petugas , Perilaku Pelaksana , Sarana dan Prasarana , Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.** Dari hasil SKM Tahun 2022 unsur “Produk Layanan” memiliki nilai terendah dari 9 unsur survey kepuasan masyarakat. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan produk layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mencakup semua disiplin ilmu yang ada.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, sebagai berikut:

Tabel: 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
IKM (Index Kepuasan Masyarakat) Bidang Perpustakaan.	%	83,89	78,79	82,80	83,09	98	90	93	92,32

Sumber: Data diolah

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.5

Indikator Sasaran	Satuan	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
IKM (Index Kepuasan Masyarakat) Bidang Perpustakaan.	%	86	88	89	90	83,89	78,79	82,80	83,09

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017

Penilaian persepsi sangat penting dalam mengukur hasil pelaksanaan SKM dalam membaca interval hingga penilaian kinerja pelayanan tabel nilai persepsi dapat memandu masyarakat dalam

menyimpulkan kinerja suatu institusi. Sehingga baik institusi maupun masyarakat nantinya dapat memberikan sumbangsih saran, pendapat hingga kritikan yang membangun.

Berikut matrik penilaian hasil pelaksanaan SKM Tahun 2022 :

Matrik penilaian hasil pelaksanaan SKM Tahun 2022

No	Unsur Pelayanan	Nilai SKM
		2022
1	Persyaratan	3,377
2	Prosedur	3,212
3	Waktu Pelayanan	3,334
4	Produk Layanan	2,907
5	Kompetensi Pelaksana	3,391
6	Perilaku Pelaksana	3,55
7	Penanganan Pengaduan	3,536
8	Sarana Prasarana	3,242
9	Biaya/Tarif	3,394
Nilai SKM		3,324
Nilai Konversi SKM		83,094
Mutu Pelayanan		B
Kinerja Unit Pelayanan		Baik

Evaluasi Unsur Terlemah dari penilaian hasil pelaksanaan SKM Tahun 2022 yaitu unsur “Produk Layanan” memiliki nilai terendah dari 9 unsur survey kepuasan masyarakat. Hal ini perlu dipelajari lebih lanjut pada bagian pengembangan bahan pustaka dalam pemilihan bahan pustaka mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan mencakup semua disiplin ilmu yang ada. Disebabkan tahun 2020 dan 2021 tidak adanya anggaran untuk pengadaan buku (bahan pustaka) namun hal ini dapat disiasati dengan cara mengolah buku yang diperoleh melalui hibah dari masyarakat untuk menambah koleksi di perpustakaan daerah serta dengan cara memanfaatkan e-book dari aplikasi ipusnas.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan terutama pada kelengkapan bahan pustaka, dengan cara pengadaan koleksi buku maupun menerima hibah buku dari masyarakat,
2. Melakukan sosialisasi terkait website/kontak person yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang digunakan sebagai media/sarana untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran dan juga pertanyaan terkait program/kegiatan, tupoksi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat,
3. Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan perpustakaan, dan memanfaatkan media sosial (Facebook dan instagram) yang dimiliki DPK.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat terdapat indikator yang tidak tercapai kinerjanya. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada Masyarakat pemakai jasa perpustakaan, melalui peningkatan minat baca menjadi budaya literasi.
2. Melakukan sosialisasi peraturan perpustakaan tentang fungsi perpustakaan kepada masyarakat baik dilaksanakan sendiri maupun bersinergi dengan pihak lain.
3. Melakukan / menyelenggarakan berbagai kegiatan yang variatif dalam rangka upaya mensejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan promosi minat baca melalui Layanan Perpustakaan Keliling.
5. Mengembangkan SDM pengelola perpustakaan dari berbagai jenis perpustakaan melalui bimbingan, Pelatihan, Pertemuan dan Kelas Magang bagi pengelola Perpustakaan.

2

Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi

Keberhasilan sasaran strategis 2 (dua) diukur dengan 1 (satu) indikator, dengan uraian sebagai berikut:

➤ **Indikator Kinerja: Capaian Nilai Pengawasan/ Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan**

Penjelasan sebagai berikut :

- 1. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan target indikator kinerja yang tersaji pada tabel berikut ini:**

Tabel: 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Capaian Nilai Pengawasan/ Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	%	90	80,80	89,78

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan indikator kinerja Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan, menetapkan target yang ingin dicapai pada tahun 2022 sebesar 90% dan terealisasi sebesar 80,80%, ini menunjukkan bahwa target lebih tinggi dibanding dengan realisasi kinerja dengan capaian kinerja sasaran sebesar 89,78%. Realisasi Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan tahun 2022 tidak tercapai, maka Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan masih perlu terus dilakukan perbaikan – perbaikan tindaklanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi (Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah) atas rekomendasi hasil audit kearsipan yang telah

dilaksanakan. khususnya pada aspek-aspek yang memperoleh penilaian belum memuaskan.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir, sebagai berikut:

Tabel: 3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Capaian Nilai Pengawasan/ Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	%	67,54	77,42	69,51	80,80	96,45	110,6	86,89	89,78

Sumber: Data diolah

Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan yang sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.

Dari sisi capaian kinerja dengan nilai 89,78%, Capaian Nilai Pengawasan /Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan pada Tahun 2022 melalui pengukuran atas pencapaian kinerja sasaran yaitu Skala Nilai Peringkat Kinerja masuk dalam kriteria tinggi dan LKD Kabupaten Kotawaringin Barat menempati nomor urut 1 (*satu*) untuk wilayah se Kalimantan Tengah.

3. perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel: 3.8

Indikator Sasaran	Satuan	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	Capaian Nilai Pengawasan/ Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	70	70	80	90	67,54	77,42	69,51	80,80

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat **“Tidak Tercapai”**.

Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholder pengelola arsip SKPD, Desa/Kelurahan,
2. SKPD belum optimal sebagai pencipta arsip masih minim dalam pengelolaan kearsipan,
3. Sebagian besar SKPD belum ada arsiparis,
4. Kompetensi tenaga teknis kearsipan di SKPD, Desa/Kelurahan belum memadai,
5. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk penyimpanan arsip pada SKPD dan Desa/Kel,
6. Belum adanya Armada Jemput Arsip (mobil sadar arsip) pada LKD,
7. Depo arsip belum memenuhi standar nasional,

8. belum dilaksanakannya audit/pengawasan internal kearsipan (SKPD, Desa/Kel),
9. Aplikasi dan sarana prasarana sebagai transformasi menuju e-arsip belum tersedia.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan dan mensosialisasikan peraturan daerah, peraturan bupati, surat edaran tentang kearsipan. Melakukan sosialisasi terkait website/kontak person yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat yang digunakan sebagai media/sarana untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran dan juga pertanyaan terkait program/kegiatan, tupoksi dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat,
2. Membangun komitmen dan dukungan dari Kepala SKPD, Kepala Desa/Kel untuk pengelolaan arsip di SKPD, Desa/Kel secara berkelanjutan.
3. Mengadakan Diklat Kearsipan bekerjasama dengan Lembaga terkait.
4. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola unit kearsipan di SKPD, Desa/Kel.

Adapun strategi dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah Meningkatkan pembinaan perubahan mindset dan culturset di bidang kearsipan melalui pengembangan pola pikir dan budaya menghargai arsip secara positif, penguatan kelembagaan kearsipan, penguatan SDM Kearsipan, pemenuhan fasilitas kearsipan, mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi, dan mengembangkan khasanah arsip guna memenuhi kebutuhan pengguna. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pembinaan dan pengembangan aparatur.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Dari dua indikator kinerja sasaran, capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat di sandingkan dengan target/standar nasional, sampai dengan tahun 2022 **belum ada** sebagai perbandingan.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap capaian kinerja tidak tercapai, dikarenakan dari dua sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel: 3.9

Kegiatan Lintas Sektoral

No	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Pihak Lain		Output	Manfaat
		Pihak	Kontribusi		
1	Pinjam pakai buku perpustakaan	1. Sekolah-sekolah di Kab. Kotawaringin Barat 2. Perguruan tinggi 3. Perpustakaan pojok balai pemasyarakatan Pangkalan Bun 4. Perpustakaan Desa/Kelurahan 5. Taman Pojok Baca 6. Polairud Kalteng 7. Perpustakaan pondok pesantren	Fasilitasi pinjam pakai buku perpustakaan sebagai sarana edukasi masyarakat	Meningkatnya literasi masyarakat	Mendukung pencapaian target kinerja Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

2	Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	1. SKPD Se Kotawaringin Barat 2. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pendampingan/ Mentoring kearsipan pada unit kearsipan SKPD dan Desa/Kel	Laporan Nilai Pengawasan/ Penyelenggaraan Ketaatan Kearsipan	Mendukung pencapaian target kinerja Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi
---	------------------------------------	---	--	--	---

3.5 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat mengalokasikan Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 6.525.413.000 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp. 6.541.356.000 Penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.360.360.217 atau sebesar 97,23%. Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel: 3.10
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Operasional	6.089.761.515	5.946.044.932	97,64
	- Belanja Pegawai	4.221.658.870	4.218.772.183	99,93
	- Belanja Barang/Jasa	1.868.102.645	1.727.272.749	92,46
2	Belanja Modal	451.594.485	414.315.285	91,74
	- Belanja Peralatan & Mesin	53.905.885	53.825.885	99,85
	- Belanja Gedung & Bangunan	274.975.000	238.292.400	86,66
	- Belanja Jalan dan Irigasi			

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	122.713.600	122.197.000	99,58
TOTAL		6.541.356.000	6.360.360.217	97,223

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA. 2022

Adapun rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel: 3.11

Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.471.128.872	5.334.125.084	97,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.558.800	8.208.800	85,88
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.899.800	549.800	28,94
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.126.250	2.126.250	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.881.250	1.881.250	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.448.250	1.448.250	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.448.250	1.448.250	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	360.000	360.000	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	395.000	395.000	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.348.823.470	4.342.955.348	99,87
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.221.658.870	4.218.772.183	99,93
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	113.776.000	111.494.765	97,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.201.100	12.501.100	94,70
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	187.500	187.300	99,89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.950.549	56.279.591	97,12

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.400.000	17.400.000	100,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.550.549	38.879.591	95,88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.106.118	188.932.433	83,93
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.893.166	6.870.631	99,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.352.174	62.048.030	99,51
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.030.405	9.980.808	99,51
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.750.000	17.310.000	92,32
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.425.373	81.067.964	70,23
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	11.655.000	11.655.000	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.103.485	34.023.485	99,77
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.103.485	34.023.485	99,77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	339.809.950	305.103.340	89,79
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000	48.000	4,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.451.600	112.274.067	81,09
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.308.350	192.781.273	96,24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.776.500	398.622.087	87,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.218.000	29.194.378	80,61
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.281.000	43.063.309	80,82
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.602.500	32.572.000	91,49
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	330.675.000	293.792.400	88,85
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	798.870.453	766.194.264	95,91
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	740.295.107	709.942.617	95,90
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	5.000.000	4.940.000	98,80

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	94.501.964	86.845.764	91,90
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.841.800	71.250.930	96,49
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	378.542.578	369.470.572	97,60
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	188.408.765	177.435.351	94,18
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.575.346	56.251.647	96,03
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	26.540.132	25.590.132	96,42
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	32.035.214	30.661.515	95,71
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSINASIONAL DAN NASKAH KUNO	80.551.500	70.802.288	87,90
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	80.551.500	70.802.288	87,90
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	80.551.500	70.802.288	87,90
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	187.865.175	186.298.581	99,17
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	67.048.480	66.868.480	99,73
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	19.924.700	19.744.700	99,10
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	47.123.780	47.123.780	100,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten /Kota	76.840.995	76.526.825	99,59
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	76.840.995	76.526.825	99,59
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	43.975.700	42.903.276	97,56
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	24.555.700	24.489.100	99,73
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	19.420.000	18.414.176	94,82

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.940.000	2.940.000	100,00
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2.940.000	2.940.000	100,00
Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	2.940.000	2.940.000	100,00
TOTAL	6.541.356.000	6.360.360.217	97,23

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TA. 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 97,23.% yang berarti masuk dalam kategori capaian “**Sangat Tinggi**”. Terjadinya sisa anggaran adalah akibat dari adanya penghematan atau efisiensi pada program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 92,32 % dengan peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Capaian kinerja keuangan 95,61% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 799.194.264 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**

2. Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dengan capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 sebesar 89,78 % dengan peringkat kinerja **tinggi**.

Capaian kinerja keuangan 99,17% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 186.298.581 sehingga masuk dalam peringkat kinerja **sangat tinggi**.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kurang lancarnya penggunaan jaringan IT karena keterbatasan kapasitas jaringan internet,
2. Kekurangan SDM khususnya petugas pengelola IT,
3. Koleksi bahan perpustakaan belum sepenuhnya terpenuhinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
4. Perpustakaan daerah belum memenuhi standar nasional kebutuhan pustakawan,
5. Sarana dan prasarana sebagian besar perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Barat belum memenuhi standart nasional,

6. Respon dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi perpustakaan masih rendah,
7. Belum maksimalnya peran perpustakaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
8. Belum ada regulasi daerah tentang perpustakaan,
9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Sudut /Pojoyok Baca, dan lain-lain,
10. Belum memadainya SDM pengelola perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat,
11. Belum optimalnya koordinasi antar stakeholder dalam hal pemberdayaan perpustakaan, sehingga belum tercapai sinergitas program/kegiatan,
12. Ketersediaan koleksi bahan pustaka di perpustakaan desa/kel, TBM masih kurang memadai,
13. belum adanya kesadaran masyarakat tentang keberadaan naskah kuno,
14. SDM terkait pengalih mediaan naskah kuno belum tersedia dalam bidang transliterasi dan terjemahan,
15. Terbatasnya koleksi budaya etnis nusantara
16. Sebagian besar SKPD, Desa/Kelurahan masih kurang memahami tentang arti pentingnya arsip,
17. Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholder pengelola arsip SKPD, Desa/Kelurahan,
18. SKPD sebagai pencipta arsip masih minim perhatiannya untuk menyerahkan arsip statis ke LKD,
19. Sebagian besar SKPD belum ada arsiparis,
20. Kompetensi tenaga teknis kearsipan di SKPD, Desa/Kelurahan belum memadai,
21. Keterbatasan sarana dan prasarana belum memadai untuk penyimpanan arsip pada SKPD dan Desa/Kel,

22. Belum adanya Armada Jemput Arsip (mobil sadar arsip) pada LKD.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan , melalui upaya :
 - a) Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penggunaan dan pengelolaan data.
 - b) Meningkatkan sarana prasarana untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna layanan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Mempertahankan dan meningkatkan pencapaian yang sudah baik, melalui upaya:
 - a) Meningkatkan kompetensi SDM yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b) Menyusun Perencanaan, Mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan realisasi kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu.
 - c) Menyusun dan menyajikan laporan kinerja kegiatan sesuai target yang sudah ditetapkan.
 - d) Menyusun dan mengendalikan resiko dalam rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian kinerja.
 - e) Menyelesaikan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang diberikan oleh pengawas pembangunan daerah.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat / mitra kerja dalam peningkatan kesejahteraan sosial , dengan upaya :
 - a) Pemberdayaan Peran serta masyarakat/ mitra kerja, baik meningkatkan jumlah dan kompetensinya.
 - b) Koordinasi dengan Lintas Sektor dan Lembaga terkait

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Februari 2023

KEPALA DINAS


M. ROSIHAN PRIBADI
NIP. 19650502 199102 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN